

***Flypaper effect* pada belanja daerah kabupaten/kota di Provinsi Jambi**

Elfira Rahma Dayanti*; Arman Delis; Emilia

Prodi. Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi

*E-mail korespondensi: elfirarahmadayanti@gmail.com.

Abstract

This research aims to analyze: 1) the contribution and growth of PAD, and the role of balancing fund in financing the regional expenditure of district/city in Jambi Province; 2) the influence of General Allocation Fund (DAU), Revenue-Sharing Fund (DBH), and Own Source Revenue (PAD) to the Regional Expenditure and to detects the flypaper effect. The analytical method used is descriptive and quantitative research methods using Estimates done by using pooled data regression. The analysis showed that the contribution and growth of PAD is still relatively low, and equalization fund had a higher contribution in financing regional expenditure. Simultaneously DAU, DBH, and PAD have a significant influence on regional expenditure. Partially, only DAU and PAD have a significant effect, while DBH has no significant effect on regional expenditure. Furthermore, the flypaper are not detected on regional expenditure district/city in Jambi Province.

Keywords: *General Allocation Fund, Revenue-Sharing Fund, Own Source Revenue, Flypaper Effect.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah, serta untuk mendeteksi terjadinya *flypaper effect*. Penelitian ini juga menganalisis kontribusi dan pertumbuhan PAD, serta peran Dana Perimbangan dalam membiayai Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. Metode analisis yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dan kuantitatif dengan menggunakan regresi linear berganda data panel. Hasil analisis menunjukkan bahwa kontribusi dan pertumbuhan PAD masih tergolong rendah, sedangkan dana perimbangan memiliki kontribusi yang tinggi dalam membiayai belanja daerah. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara simultan DAU, DBH, dan PAD mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah. Namun secara parsial, hanya DAU dan PAD mempunyai pengaruh yang signifikan, sedangkan DBH tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Selanjutnya, tidak terjadi *flypaper effect* pada belanja daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.

Kata Kunci: Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Flypaper Effect

PENDAHULUAN

Indonesia menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasan kepada daerah untuk

menyelenggarakan otonomi daerah. Desentralisasi dipahami sebagai penyerahan otoritas dan fungsi dari pemerintah nasional kepada pemerintah sub-nasional atau lembaga independen (The World's Bank Group, 2004). Otonomi daerah bertujuan untuk mewujudkan kemandirian daerah sehingga daerah bebas untuk mengatur dirinya tanpa ada campur tangan pemerintah pusat. Setiap daerah dipercaya untuk mengatur dan merencanakan bagaimana daerahnya harus dibangun, dan dikembangkan menurut sumber daya yang dimiliki, baik untuk sumber daya manusia maupun sumber daya alamnya guna meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat demi terwujudnya otonomi daerah (Yani, 2013).

Diberlakukannya otonomi daerah, menuntut pemerintah daerah untuk lebih mandiri, termasuk mandiri dalam masalah keuangan. Meskipun demikian pemerintah pusat tetap memberikan bantuan berupa dana alokasi umum (DAU) sebagai mana yang tercantum dalam UU No. 23 Tahun 2014. Dalam UU tersebut dinyatakan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah, pemerintah pusat akan mentransfer dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan bagian daerah dari Dana Bagi Hasil (DBH) yang terdiri dari pajak dan sumber daya alam.

Sumber pendapatan Pemda salah satunya bersumber dari dana perimbangan, selain itu Pemda mempunyai sumber pendanaan sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan sumber dana daerah yang digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan di tingkat daerah. Dana alokasi umum berperan sebagai pemerata fiskal antardaerah (*fiscal equilization*) di Indonesia, sedangkan dana alokasi khusus berperan sebagai dana yang didasarkan pada kebijakan yang bersifat darurat. Dana bagi hasil berperan sebagai penyeimbang fiskal antara pusat dan daerah dari pajak yang dibagihasilkan (Saragih, 2003).

Dalam rangka menyediakan pelayanan publik, maka pemerintah daerah melakukan suatu pengeluaran yang disebut belanja daerah. Seluruh pendapatan daerah yang diperoleh baik dari daerahnya sendiri maupun bantuan dari pemerintah pusat akan digunakan untuk membiayai seluruh pengeluaran daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran yang bersangkutan. Pada praktiknya, transfer dari pemerintah pusat merupakan dana utama pemerintah daerah untuk membiayai operasi utamanya sehari-hari, yang oleh pemerintah daerah dilaporkan diperhitungkan APBD. Hal ini dapat disebabkan oleh perbedaan penafsiran mengenai DAU oleh daerah-daerah.

Selain DAU dan PAD, Dana Bagi Hasil (DBH) diambil sebagai tambahan variabel independen karena DBH digunakan untuk mendanai kebutuhan daerah (belanja daerah). DBH merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU No.33 Tahun 2004, Tentang *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*). DBH yang ditransfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terdiri dari 2 jenis, yaitu DBH pajak dan DBH bukan pajak (Sumber Daya Alam). DBH merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah yang bukan berasal dari PAD selain DAU dan DAK.

Alokasi dana perimbangan pada umumnya lebih banyak didasarkan pada aspek belanja tetapi kurang memperhatikan kemampuan dalam meningkatkan PAD. Akibatnya, dari tahun ke tahun Pemerintah Daerah selalu menuntut transfer yang lebih

besar lagi dari pusat, bukannya mengeksplorasi basis pajak lokal secara lebih optimal. Apabila kondisi ini terus berlanjut, maka akan menyebabkan ketergantungan Pemerintah Daerah yang lebih tinggi terhadap alokasi dana perimbangan dari Pemerintah Pusat untuk membiayai belanja daerah. Ketika pemerintah daerah merespon belanja daerahnya lebih banyak berasal dari dana transfer (dana perimbangan) daripada pendapatan asli dari daerahnya tersebut sehingga akan mengakibatkan pemborosan dalam belanja daerah, maka hal itu dapat menyebabkan terjadinya fenomena *flypaper effect*. *Flypaper Effect* itu sendiri merupakan respon yang asimetris terhadap peningkatan dan penurunan penggunaan dana transfer dari pemerintah pusat, dimana dana transfer tersebut diberikan untuk jangka waktu tertentu dengan indikasi adanya pihak yang memperoleh keuntungan dari penerimaan transfer (*grants*) yang cenderung meningkat (Ekawarna, 2017).

Berdasarkan kajian empiris dari beberapa peneliti terdahulu yang menganalisis dan menguji tentang *flypaper effect* di berbagai daerah menghasilkan kesimpulan yang kontradiktif. Penelitian sebelumnya telah diteliti oleh Kusumadewi dan Rahman (2007) dengan judul *Flypaper Effect* Pada Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten/Kota di Indonesia yang menyimpulkan bahwa PAD dan DAU secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah serta membuktikan terjadinya *flypaper effect* pada belanja daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Maimunah (2006), Masdjojo dan Sukartono (2009), dan Afrizawati (2012).

Berbeda halnya dengan hasil penelitian Pramuka (2010) yang menyimpulkan tidak terjadinya *flypaper effect* pada Kabupaten/Kota di Pulau Jawa, mengindikasikan bahwa *flypaper effect* tidak hanya terjadi pada daerah penelitiannya. Penelitian yang dilakukan oleh Nahlia (2014) juga menunjukkan bahwa berdasarkan analisis variabel PAD secara parsial berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah, sedangkan DAU dan DAK secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah.

Provinsi Jambi sebagai salah satu provinsi yang terbentuk setelah adanya otonomi daerah diharapkan dapat lebih mampu berinovasi serta mengeksplorasi sumber-sumber alam yang terkandung di wilayahnya. Lambat laun ketergantungan akan dana transfer dapat dihilangkan seiring dengan adanya penambahan PAD.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: 1) kontribusi dan pertumbuhan PAD serta peran dana perimbangan dalam membiayai belanja daerah kabupaten/kota di Provinsi Jambi; 2) pengaruh DAU, DBH dan PAD terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi baik secara parsial maupun simultan; 3) *flypaper effect* pada keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.

METODE

Jenis dan sumber data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan realisasi APBD kabupaten/kota di Provinsi Jambi. Data tersebut mencakup data Dana alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), PAD (Pendapatan Asli Daerah), dan Belanja Daerah. Data diperoleh dari situs departemen keuangan Dirjen Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dan Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, serta dari instansi terkait dan berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian ini.

Alat analisis

Data dianalisis secara deskriptif serta regresi linier berganda data panel (*pooled data*). Data *time series* selama lima tahun yaitu periode Tahun 2011-2016, dan data *cross section* sebanyak 11 kabupaten/kota di Provinsi Jambi.

Fomulasi regresi data panel pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$BD_{it} = \beta_0 + \beta_1 DAU_{it} + \beta_2 DBH_{it} + \beta_3 PAD_{it} + e_{it}$$

Keterangan:

BD = Belanja Daerah
 DAU = Dana Alokasi Umum
 DBH = Dana Bagi Hasil
 PAD = Pendapatan Asli Daerah
i = kabupaten/kota
t = waktu/periode
 β_0 = konstanta
 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = koefisien regresi
e = *error term*

Model regresi dengan menggunakan data panel secara umum mengakibatkan kesulitan dalam spesifikasi modelnya. Residualnya akan mempunyai 3 (tiga) kemungkinan, yaitu residual *time series*, *cross-section* maupun gabungan *time series* dan *cross-section*. Maka terdapat 3 (tiga) pendekatan dalam regresi data panel ini, yaitu:

Metode common effect model atau pooled least square

Pada pendekatan ini model mengasumsikan bahwa data gabungan yang ada, menunjukkan kondisi sesungguhnya dimana nilai intersep dari masing-masing variabel adalah sama dan *slope* koefisien dari variabel-variabel yang digunakan adalah identik untuk semua unit *cross-section* (tidak ada perbedaan ada dimensi kerat waktu).

Pendekatan fixed effect model (model efek tetap)

Model ini mengasumsikan bahwa perbedaan antar individu dapat diakomodasikan dari perbedaan intersepnya. Untuk mengestimasi data panel model *fixed effect* menggunakan teknik variabel *dummy* untuk menangkap perbedaan intersep antar perusahaan. Perbedaan intersep bisa terjadi karena budaya kerja, manajerial dan insentif. Model ini disebut LSDV (*Least Square Dummy Variable*).

Pendekatan random fixed effect (efek acak)

Dalam menganalisis regresi data panel, selain menggunakan metode FEM, analisis regresi dapat pula menggunakan metode REM. Metode ini digunakan untuk mengatasi kelemahan metode FEM yang menggunakan variabel semu (*dummy variable*), sehingga akibatnya model mengalami ketidakpastian.

Dari ketiga model tersebut, selanjutnya akan ditentukan model yang paling tepat untuk mengestimasi parameter regresi data panel, yaitu:

Uji Chow

Chow test yaitu pengujian untuk menentukan apakah model *Pooled Least Square* atau *Fixed Effect Model* yang paling tepat digunakan dalam mengestimasi data panel.. Hipotesis dalam uji chow adalah:

H_0 : *Common Effect Model*

H_1 : *Fixed Effect Model*

Dasar penolakan terhadap hipotesis di atas adalah jika nilai Prob. Cross-section Chi-square < 0,05 maka kita akan memilih *fixed effect model*. Dan sebaliknya jika nilainya > 0,05 maka kita akan memilih *pooled least square*.

Uji Hausman

Digunakan untuk menguji manakah antara model *Fixed Effect Model* atau *Random Effect Model* yang paling tepat digunakan. Pengujian Hausman dilakukan dengan hipotesis berikut:

H_0 : *Random Effect Model*

H_1 : *Fixed Effect Model*

Statistik uji Hausman ini mengikuti distribusi statistik *chi-square* dengan *degree of freedom* sebanyak k , dimana k adalah jumlah variabel independen. Jika nilai statistik Hausman lebih besar dari nilai kritisnya maka H_0 ditolak dan model yang paling tepat digunakan adalah *Fixed Effect Model* sedangkan sebaliknya bila nilai statistik Hausman lebih kecil dari nilai kritisnya maka model yang paling tepat adalah model *Random Fixed Effect*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kontribusi dan pertumbuhan PAD serta peran dana perimbangan dalam membiayai belanja daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi

Persentase kontribusi PAD merupakan ratio perbandingan PAD dengan total penerimaan daerah (belanja rutin dan belanja pembangunan). Rasio ini mengukur seberapa jauh kemampuan daerah membiayai kegiatan rutin dan kegiatan pembangunan. Rasio ini dapat digunakan untuk melihat kapasitas kemampuan keuangan daerah. Tabel 1, 2 dan 3 menyajikan rincian kontribusi PAD terhadap Belanja Daerah dan pertumbuhan PAD Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2011-2016.

Tabel 1. Kontribusi PAD terhadap belanja daerah kabupaten/kota di Provinsi Jambi Tahun 2011-2016

Kabupaten/Kota	Kontribusi PAD terhadap BD (%)						Rerata Kontribusi (%)
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Kab. Batanghari	5.76	4.84	5.27	7.43	7.07	7.05	6.24
Kab. Bungo	9.08	8.60	8.11	10.36	9.60	10.54	9.38
Kab. Kerinci	5.36	4.44	4.58	6.63	7.68	7.35	6.01
Kab. Merangin	5.56	3.86	4.93	6.56	6.73	5.77	5.57
Kab. Muaro Jambi	4.23	4.60	4.67	6.12	6.37	5.34	5.22
Kab. Sarolangun	4.98	3.86	4.02	7.24	8.14	8.41	6.11
Kab. Tanjung Jabung Barat	5.55	5.18	4.89	5.72	6.68	8.57	6.10
Kab. Tanjung Jabung Timur	3.52	3.62	3.16	3.62	4.16	4.13	3.70
Kab. Tebo	3.64	4.33	4.46	6.34	6.73	5.99	5.25
Kota Jambi	11.56	11.02	12.94	19.28	18.50	18.83	15.36
Kota Sungai Penuh	3.61	4.24	4.34	5.98	5.51	4.93	4.77
Maksimum	11.56	11.02	12.94	19.28	18.50	18.83	
Minimum	3.52	3.62	3.16	3.62	4.16	4.13	
Rata-rata	5.71	5.33	5.58	7.75	7.92	7.90	

Sumber: Direktorat jenderal perimbangan dan keuangan, (Data diolah 2018)

Kontribusi PAD terhadap belanja daerah masih tergolong kecil. Selama periode Tahun 2011-2016, secara rata-rata kontribusi PAD terhadap belanja daerah pertahunnya berkisar antara 5,33 persen sampai 7,92 persen. Selanjutnya jika dilihat berdasarkan kabupaten/kota, Kota Jambi memiliki kontribusi terbesar yaitu 15,36 persen sedangkan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan kontribusi terendah yaitu hanya 3,70 persen.

Selanjutnya, tingkat pertumbuhan menggambarkan seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang

telah dicapai dari periode ke periode berikutnya (Halim, 2001). Berdasarkan Tabel 2 menjelaskan bahwa pertumbuhan PAD di Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi berfluktuasi setiap tahunnya. Pertumbuhan PAD tertinggi yaitu sebesar 94,71% dialami oleh Kabupaten Sarolangun di tahun 2014, sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Merangin yaitu sebesar -24,05%. Rerata persentase pertumbuhan PAD per tahun dari ke-sebelas Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi tahun 2011 sebesar 49,44%, menurun drastis pada tahun 2012 yaitu sebesar 10,37%. Lalu di tahun 2013 kembali meningkat sebesar 24,84%, tahun 2014 sebesar 47,42%. Kembali menurun drastis di tahun 2015 yaitu sebesar 9,68%, dan puncaknya di tahun 2016 sebesar 7,31%. Dengan rata-rata 24,84%, dapat disimpulkan bahwa tingkat pertumbuhan PAD Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi kurang berhasil dalam meningkatkan pendapatan daerahnya terutama PAD.

Tabel 2. Persentase pertumbuhan PAD kab/kota di Provinsi Jambi tahun 2011-2016

Kabupaten /Kota	Persentase Pertumbuhan PAD						Rerata Pertumbuhan
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Kab. Batanghari	60.80	4.20	35.98	39.87	-2.66	6.66	24.14
Kab. Bungo	32.37	5.89	24.77	33.44	-1.63	9.06	17.32
Kab. Kerinci	14.46	-8.36	13.83	52.43	26.84	14.74	18.99
Kab. Merangin	56.61	-24.05	47.44	51.36	14.51	-2.33	23.92
Kab. Muaro Jambi	67.67	28.94	33.37	26.99	3.30	-4.76	25.92
Kab. Sarolangun	67.03	-11.38	11.78	94.71	40.05	8.26	35.07
Kab. Tanjung Jabung Barat	86.14	9.91	22.43	38.71	-10.23	26.30	28.88
Kab. Tanjung Jabung Timur	23.39	19.55	1.28	16.35	10.91	14.20	14.28
Kab. Tebo	22.44	37.89	27.44	65.58	9.13	-1.77	26.79
Kota Jambi	39.75	14.23	31.79	65.34	7.10	8.94	27.86
Kota Sungai Penuh	73.19	37.26	23.15	36.81	9.18	1.06	30.11
Maksimum	86.14	37.89	47.44	94.71	40.05	26.30	
Minimum	14.46	-24.05	1.28	16.35	-10.23	-4.76	
Rata-rata	49.44	10.37	24.84	47.42	9.68	7.31	24.84

Sumber: Direktorat jenderal perimbangan dan keuangan, (Data Diolah 2018)

Dana perimbangan terdiri dari DBH, DAU, dan DAK ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal. Dikarenakan kontribusi PAD masih relatif rendah, maka Pemerintah Daerah melalui APBD sangat menggantungkan pembiayaan kegiatan pemerintahan dari penerimaan dana perimbangan ini. Kontribusi dana perimbangan terhadap belanja daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2011-2016 dapat dilihat pada Tabel 3. Untuk menghitung kontribusi dana perimbangan terhadap belanja daerah, peneliti hanya menggunakan DAU dan DBH.

Adapun daerah yang memberikan kontribusi dana perimbangan terhadap belanja daerah terbesar adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Sebaliknya, Kota Jambi memberikan kontribusi dana perimbangan terhadap belanja daerah pada tahun 2015 sebesar 52,67%. Rerata kontribusi dana perimbangan terhadap belanja daerah per tahunnya adalah 79,16% pada tahun 2011. Pada tahun 2012 meningkat menjadi 82,73%. Namun dua tahun berturut-turut kontribusi dana perimbangan terhadap belanja daerah menurun menjadi 77,21% di tahun 2013 dan 64,32% di tahun 2014. Pada tahun 2016 kembali meningkat sebesar 67,41%. Rerata kontribusi dana perimbangan terhadap belanja daerah dalam periode tahun 2011-2016 adalah sebesar 75,41%.

Secara umum, alokasi dana perimbangan masih merupakan sumber pendapatan daerah yang dominan dan merupakan komponen yang mewarnai kapasitas fiskal daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tingginya kontribusi dana perimbangan dalam membiayai belanja daerah menunjukkan bahwa dana perimbangan memiliki peran yang sangat vital dalam ketersediaan dana untuk menjalankan roda pemerintahan.

Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi selama ini masih sangat bergantung pada bantuan dana dari Pemerintah Pusat dalam pembiayaan administrasi pemerintahan dan pembangunan.

Tabel 3. Kontribusi dana perimbangan terhadap belanja daerah kabupaten/kota di Provinsi Jambi tahun 2011-2016

Kabupaten/Kota	Kontribusi Dana Perimbangan terhadap BD (%)						Rerata Kontribusi (%)
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Kab. Batanghari	80.58	86.41	79.08	76.66	69.06	74.16	77.66
Kab. Bungo	71.83	77.67	66.75	68.53	61.06	65.69	68.59
Kab. Kerinci	68.94	74.10	73.96	74.38	64.97	58.60	59.72
Kab. Merangin	72.61	79.88	78.21	72.96	62.79	61.14	71.26
Kab. Muaro Jambi	78.35	84.86	72.30	74.07	71.22	72.88	75.61
Kab. Sarolangun	76.43	81.80	84.06	80.39	60.19	64.11	74.49
Kab. Tanjung Jabung Barat	106.51	101.10	85.52	68.51	69.79	93.58	87.50
Kab. Tanjung Jabung Timur	82.19	86.12	85.02	80.11	67.42	66.07	77.82
Kab. Tebo	83.97	87.41	80.76	72.64	65.72	67.45	76.32
Kota Jambi	66.43	68.39	67.14	62.77	52.67	54.38	61.97
Kota Sungai Penuh	82.89	82.24	76.50	78.71	62.66	63.49	74.41
Maksimum	106.51	101.10	85.52	80.39	71.22	93.58	
Minimum	66.43	68.39	66,75	62.77	52.67	54.38	
Rata-rata	79.16	82.73	77,21	73.61	64.32	67.41	75,41

Sumber: Direktorat jenderal perimbangan dan keuangan, (Data diolah 2018)

Selama kurun waktu enam tahun terakhir (2011-2016), jumlah dana perimbangan yang dialokasikan bagi Pemerintah Daerah terus mengalami peningkatan. Meskipun demikian, diakui bahwa kebijakan transfer ke daerah dalam rangka mengurangi ketimpangan vertikal antara pusat dan daerah melalui DBH dan meminimalkan kesenjangan fiskal antardaerah melalui DAU, masih menghadapi tantangan yang cukup berat dengan adanya alokasi dana penyesuaian tertentu yang belum sepenuhnya berdasarkan formula dan kriteria. Selain itu, adanya dana perimbangan belum mampu mewujudkan pembangunan daerah secara merata.

Pengaruh DAU, DBH dan PAD terhadap belanja daerah kabupaten/kota di Provinsi Jambi

Untuk mengetahui pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap belanja daerah, maka dilakukan regresi data panel, dimana sebelumnya dilakukan uji Chow dan uji Hausman, sehingga terpilih model estimasi yang paling baik digunakan adalah metode FEM. Tabel 4 merupakan hasil data panel dengan menggunakan metode FEM.

Dapat dilihat bahwa nilai Probabilitas F-stat (*p-value*) sebesar $0,000000 < 0,05$ maka H_1 diterima. Hal ini memberikan makna bahwa variabel Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil dan Pendapatan Asli Daerah secara bersama-sama berpengaruh terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. Berdasarkan hasil uji t, secara parsial DAU dan PAD berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Hal ini dapat diketahui dari nilai probabilitas masing-masing variabel yang lebih kecil dari tingkat kesalahan $\alpha = 5\%$ atau 0,05. Sedangkan DBH tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel Belanja Daerah. Nilai koefisien determinasi yang diperoleh sebesar 0,914442. Hal ini berarti bahwa 91,44% belanja daerah dipengaruhi oleh DAU, DBH, dan PAD sedangkan sisanya yaitu 8,56% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar penelitian.

Analisis *flypaper effect* yang dapat disimpulkan adalah bahwa meskipun DAU dan PAD secara signifikan dapat mempengaruhi Belanja Daerah, namun PAD ternyata lebih berpengaruh dibandingkan DAU. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien regresi PAD ternyata lebih besar dibandingkan nilai koefisien regresi DAU, yakni 1,506206 untuk

DAU dan 1,575201 PAD. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi *flypaper effect* pada belanja daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. Artinya, kebijakan Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2011-2016 lebih didominasi PAD dibandingkan dengan DAU.

Tabel 4. Hasil regresi data panel metode FEM

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	36195.05	71646.54	0.505189	0.6156
DAU?	1.506206	0.143729	10.47950	0.0000
DBH?	0.184032	0.216540	0.849875	0.3993
PAD?	1.575201	0.432888	3.638816	0.0006
Fixed Effects (Cross)				
_BTH--C	-10659.92			
_BUN--C	-52334.03			
_KER--C	-47536.94			
_MER--C	-42999.97			
_MJB--C	-7833.972			
_SAR--C	-14028.38			
_TJB--C	206692.6			
_TJT--C	134849.3			
_TEB--C	-42660.75			
_JBI--C	-77585.69			
_SPN--C	-45902.28			
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.931554	Mean dependent var		900989.8
Adjusted R-squared	0.914442	S.D. dependent var		226791.3
S.E. of regression	66336.98	Akaike info criterion		25.22871
Sum squared resid	2.29E+11	Schwarz criterion		25.69319
Log likelihood	-818.5476	Hannan-Quinn criter.		25.41225
F-statistic	54.44014	Durbin-Watson stat		1.727440
Prob(F-statistic)	0.000000			

Bila dicermati, dalam kurun waktu 2011-2016 besaran nilai PAD yang diperoleh Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi mengalami peningkatan. Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Pramuka (2010) dimana tidak ada *flypaper effect* pada pengeluaran Pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa pada Tahun 2005-2008. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memprediksi Belanja Daerahnya (BD) lebih mengutamakan kemampuan keuangannya sendiri yang diproksi dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang menyatakan diduga terjadi *flypaper effect* pada DAU, DBH, dan PAD terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi ditolak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kontribusi PAD terhadap belanja daerah kabupaten/kota di Provinsi Jambi masih tergolong rendah. Pertumbuhan PAD di kabupaten/kota di Provinsi Jambi berfluktuasi setiap tahunnya, dan dapat disimpulkan bahwa tingkat pertumbuhan PAD kabupaten/kota di Provinsi Jambi kurang berhasil dalam meningkatkan pendapatan daerahnya terutama PAD.

Kontribusi dana perimbangan terhadap belanja daerah di kabupaten/kota di Provinsi Jambi dalam kurun waktu 2011-2016 cukup tinggi. Selama kurun waktu enam tahun terakhir 2011-2016, jumlah dana perimbangan yang dialokasikan bagi pemerintah daerah terus mengalami peningkatan. Hasil estimasi regresi menunjukkan bahwa DAU, DBH, dan PAD secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Secara individu, DAU dan PAD masing-masing berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah, sedangkan DBH tidak berpengaruh secara signifikan terhadap belanja daerah namun kecenderungan ke arah positif. Serta tidak terjadi *flypaper effect* pada Belanja Daerah di kabupaten/kota di Provinsi Jambi.

Saran

Bagi pemerintah daerah Provinsi Jambi sebaiknya melakukan perencanaan yang lebih tepat lagi di periode yang akan datang dalam menyusun anggaran daerahnya agar lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan daerah. Selain itu semua pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah baik yang berasal dari transfer pemerintah pusat maupun pendapatan asli daerah yang harus dapat digunakan dengan tepat sasaran sehingga dapat menjamin kesejahteraan masyarakatnya.

Kemandirian daerah melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah harus ditingkatkan sehingga pada akhirnya faktor yang paling berpengaruh terhadap belanja daerah adalah Pendapatan Asli Daerah, bukan Dana Perimbangan. Selain itu, alokasi pos-pos yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah disajikan lebih rinci untuk memperoleh hasil yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Aulia, N. L. (2016). *Analisis Flypaper Effect Pada Belanja Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat*. Skripsi Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Andalas: Padang.
- Devita, A.; Arman, D.; Junaidi, J. (2014). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Jumlah Penduduk terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, Vol 2(2); 63-70.
- Ekawarna, S.U. (2017). Analisis Flypaper Effect pada Belanja Daerah (Studi Komparasi Daerah Induk dan Pemekaran kabupaten/kota di Provinsi Jambi). *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, Vol. 4(3); 167-184.
- Fahmi, I. (2013). *Analisis Laporan Keuangan*. Alfabeta: Bandung.
- Gujarati, Damodar. (2006). *Dasar-dasar Ekonometrika*. Jilid 1. Erlangga: Jakarta.
- Halim, A. (2004). *Akuntansi Sektor Publik-Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. Salemba Empat: Jakarta.
- Iskandar, I. (2012). Flypaper Effect pada Unconditional Grant. *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi dan Pembangunan*, Vol. 13(1); 113-131.
- Kuncoro, M. (2004). *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Erlangga: Jakarta.
- Kusumadewi, D.A.; Rahman, A. (2007). Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Auditing Indonesia*, Vol. 11(1); 67-80.
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. ANDI: Yogyakarta.
- Saragih, P. J. (2003). *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Ghalia Indonesia: Jakarta.

- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta: Jakarta.
- Pramuka, B. A. (2010). Flypaper Effect Pada Pengeluaran Pemerintah Daerah Di Jawa. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 11(1); 1-12.
- Yani, A. (2013). *Keuangan Negara dan Daerah*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.